BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis persampahan di DKI Jakarta adalah ancaman bagi kualitas sosial dan lingkungan. Persoalan sampah di kota besar merupakan persoalan yang seharusnya dapat ditangani dari hulu ke hilir yang berupa aktivitas manusia. Hal ini meliputi cara membuang sampah yang dikerjakan masyarakat (Pramanti & Chotim, 2019) (Khairussyifa, Nisa, & Harjawati, 2022). Kondisi ini seiring dengan disampaikannya (Hendrawan, 2008), bahwa persoalan sampah tidak terlepas dari banyak jenis kegiatan dalam bentuk besar, menengah ataupun kecil dalam pengelolaannya yang meliputi kegiatan bisnis, penjualan, aktivitas kantor, rumah sakit dan berbagai sektor lain yang dapat menimbulkan suatu pencemaran apabila persoalan mengenai sampah tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Seiring dengan hal diatas maka persoalan kebijakan yang belum terrepresentasi dengan baik oleh stakeholders mengakibatkan multitafsir antara tujuan dari Peraturan Undang-Undang khususnya pada UU. No 18 Taun 2008 yang mengatur mengenai Sampah dan Pengelolaan Sampah, bahwa representasi ruang bagi masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan sampah secara maksimal dari tingkat rumah tangga. Sedangkan di dalam kebijakan timbulan sampah yang disampaikan terus meningkat oleh KLHK DKI Jakarta meningkat karena adanya aktivitas pembuangan sampah yang tidak terealisasi dari hulu atau dari tingkat rumah tangga. Kota-kota besar seperti DKI Jakarta selalu mengalami hal yang serupa akibat meningkatnya timbunan sampah (Kahfi, 2017).

Gambar 1.1 Data Timbunan Sampah

Merujuk pada grafik diatas dijelaskan bahwa peningkatan jumlah volume sampah menghasilkan 11,25 juta ton. Apabila dilihat, masyarakat masih lalai terhadap pengelolaan sampah. Hal ini diperlukan pengoptimalan perangkat regulasi mengenai penanganan dan pengembangan sampah yang berwawasan lingkungan. Selain itu, paradigma yang tidak sesuai harus diubah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani permasalahan sampah. Perlu adanya komitmen yang kuat dan inovasi baru dari semua pihak untuk keberlanjutan pengelolaan sampah. Dengan hal ini terlihat gambaran ketidakmampuan masyarakat dalam menerjemahkan kebijakan kepada tindakan sehari-hari dalam melakukan aktifitas dan memaknai sampah di dalam ruang representasinya.

Gambar 1. 2 Kota Indonesia Penghasil Timbunan Sampah Terbanyak 2023

Sesuai dengan data tahun pada tahun 2023 mengenai Kota di Indonesia Penghasil Timbunan Sampah terbanyak, maka terlihat bahwa dari 128 kota yang terdata pada laman SIPSN di tahun 2023, kota di Pulau Jawa mendominasi pada daftar sepuluh kota teratas penghasil timbunan sampah terbanyak pada lima wilayah daerah provinsi DKI Jakarta Peringkat pertama diduduki oleh Jakarta Timur yang menghasilkan 851,6 ribu ton timbunan sampah tahunan. Hasil ini diikuti dengan Jakarta Barat di peringkat kedua yang menghasilkan 748,1 ribu ton sampah dan Jakarta Selatan di peringkat ketiga yang menghasilkan 719,5 ribu ton sampah.

Hal ini memperjelas bahwa permasalahan sampah di Indonesia masih belum teratasi hingga saat ini. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah mengakibatkan sungai tercemar. Sungai Ciliwung salah satunya yang tercemar karena besarnya volume sampah, yang mana sungai ini salah satu yang mempunyai aliran yang terbesar di Pulau Jawa melintasi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sungai Ciliwung melewati dari kaki Gunung Pangrango, Jawa Barat, menuju Jakarta melalui Rezim Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan bermuara di Teluk Jakarta. Keberadaan sungai ciliwung sebagai kawasan tempat tinggal manusia dan juga ekosistem lainnya membuat penting dalam perkembangan masyarakat di DKI Jakarta.

Sungai Ciliwung merupakan cedera sungai dalam beberapa tahun. Hal ini yang menyebabkan pencemaran air dan penumpukan volume sampah. Akibat penumpukan sampah oleh aktivitas industri maupun aktivitas manusia dalam rumah tangga. Adam Febriyanto Wakil kepala Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia, menyatakan mengenai hal yang mencemari sungai ciliwung berupa sampah kantong plastik, polistiren, kain, kayu, sintetis maupun kulit, hingga yang lain. Maka, seluruh pihak terkait harus berkolaborasi dalam hal mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.

Data disebutkan bahwa sebanyak 1,34 ton per jam, sungai ciliwung menghasilkan sampah yang sedemikian besar. Beban lingkungan yang mengakibatkan masyarakat yang menetap di kawasan tidak layak huni di area padat sungai Ciliwung menjadi memiliki makna yang berbeda terhadap keberadaan sampah itu sendiri. Seolah-olah mereka sudah terbiasa hidup dengan berdampingan sampah. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat yang hidup berdampingan di bantaran sungai ciliwung termasuk ke dalam masyarakat kecil atau kumuh. Menurut data BPS (2020), wilayah yang menyumbang presentasi keluarga yang bertempat di bantaran sungai paling tinggi yang berada di Ibu Kota adalah Jakarta Timur dengan 35,71%, selanjutnya Jakarta Selatan mencapai 32,82%, dan sebanyak 18,7% di Jakarta Utara, 8,39% untuk Jakarta Barat, dan 4,46% pada Jakarta Pusat yang merupakan presentase paling rendah. SIPSN juga mencatat komposisi sampah yang paling banyak dihasilkan menurut

jenis sampah adalah sisa makanan sebanyak 44,1%. Sedangkan, sampah plastik menyumbang 18,9% sampah dari total komposisi sampah secara keseluruhan.

Hal ini yang menyebabkan padatnya penduduk yang ada di DKI Jakarta dan memberi dampak pada kemunculan banyak daerah yang kumuh, terliput di kawasan sungai ciliwung. Karena di daerah sungai ciliwung yang sudah ditempati oleh masyarakat memiliki pengelolaan sampah yang belum bisa ditangani dalam aliran sungai atau DAS. Bahwa di Indonesia sendiri wilayah perkotaannya selalu dilalui dengan daerah aliran sungai karena banyaknya sungai di aliran perkotaan dan menjadikan potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan sampah di perkotaan. Hal ini yang menyebabkan bahwa masyarakat memandang bahwa tinggal di bantaran sungai sudah menjadi pilihan yang terbaik untuk menghidupi kebutuhan mereka yang diakibatkan tingkat kondisi sosial ekonomi yang masih rendah dan mereka hanya mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Padahal proses dialektika yang terbangun dalam menyusun serangkaian kesadaran masyarakat agar dapat menolak atau menghindari hidup di dalam tumpukan sampah sehari-hari yang secara masif dapat terlihat dari sampah padat, sampah cair dan tidak jarang menimbulkan bau yang menyengat. Sebab mereka memanfaatkan sungai sebagai wadah untuk membuang sampah rumah tangga, dan mempunyai variasi volume dari yang sedikit sampai yang banyak. Kategori pada volume sampah dari masyarakat bantaran Sungai Ciliwung mencapai satu hingga dua kantong setiap harinya.

Tak hanya itu, sungai ini juga digunakan oleh masyarakat sebagai tempat beraktivitas MCK (mandi, cuci dan kaki) oleh masyarakat yang ada di pinggir Sungai Ciliwung (Priambodo, Fatchiya, & Yulanto, 2006). Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi yang rendah di kawasan tersebut juga memperburuk situasi, dimana masyarakat sering kali tidak memiliki pilihan lain untuk mengelola sampah mereka. Hal ini mengakibatkan kualitas hidupnya menjadi tidak terjamin. Seharusnya Kota menghadirkan kesejahteraan hidup dan kualitas yang terjamin bagi mereka yang berada di DKI Jakarta.

Pemukiman tampak kumuh yang berada sepanjang sungai Ciliwung sekarang sudah menjadi permasalahan nasional, termasuk di dalam konteks penanggulangan banjir, konservasi sungai, hingga di dalam pandangan (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2012). Keberadaan kawasan pemukiman ini telah hadir sejak 60 tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani hal ini masih belum sepenuhnya tuntas, sebab isu pemukiman ini masih belum teratasi sampai dengan saat ini. Sebab rancangan penanganan tersebut tidak dibuatkan konsep yang komprehensif oleh pemerintah, sebab masyarakat tidak turut dilibatkan.

Upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan pemerintah cenderung tidak mempertimbangkan aspek utama pada pemukiman tersebut, dalam hal ini masyarakat. Kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang sungai Ciliwung cenderung diabaikan oleh pemerintah (Nikmah, 2010). Pemukiman yang berkembang secara berantakan dan tanpa kendali, serta pembangunan yang tidak mematuhi peraturan yang diberlakukan, akan berkembang mengikuti pola yang tidak berkelanjutan seiring waktu. Situasi ini dapat memperburuk masalah sampah, karena kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai, dan akhirnya menyebabkan munculnya isu permasalahan sampah di permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, UU No. 18 Tahun 2008 menjadi solusi alternatif dalam pengelolaan sampah. Sebab itu, perlu adanya sosialisasi serta keterangan pihak pemerintah perihal regulasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Tetapi, hal tersebut tentu tidak mudah, terlebih berusaha merubah perilaku dan kebiasaan yang sudah lama masyarakat lakukan supaya mampu memilah sampah yang ada, serta melakukan pengolahan sesuai dengan prinsip pengurangan dan penanganan sampah (Wahyono, 2001).

Pemerintah juga telah melakukan program perencanaan guna berupaya menormalisasikan Sungai Ciliwung. Dengan program utama Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Program ini menjadi bagian integral dari komitmen Pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah plastik, yang semakin mencemari lingkungan. Dalam program tersebut pemerintah tidak

hanya berfokus dalam upaya membersihkan sungai, namun juga memberi edukasi serta sosialisasi dengan aktif perihal pengolahan sampah bagi masyarakat sekitar.

Dalam program Plastic Smart Cities (PSC), yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam tingkat lokal maupun dunia. Pada awalnya, masyarakat tidak tertarik dalam menjalankan program pengelolaan sampah tetapi kegiatan dari program ini berhasil karena masyarakat sadar untuk menjalankan program pengelolaan sampah dan sudah membawa perubahan kearah yang positif pada kebersihan lingkungan dan menyebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat perihal pentingnya untuk mengelola sampah secara baik.

Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas dan dinamika pemaknaan atau representasi ruang masyarakat yang tinggal dilingkungan kumuh di slum area sempadan sungai ciliwung menjadi perhatian penulis dalam proposal penelitian. Maka dari itu merujuk kepada program atau cita-cita SDGs Development Goals di Indonesia. Bahwa persoalan sampah juga harus dapat menjadi muatan atau solusi berharga dan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah kota khususnya DKI Jakarta yang memiliki sungai besar sebagai wadah kehidupan bagi masyarakat yang masih bertempat di bawah garis kemiskinan khususnya di daerah Sungai.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada permasalahan konseptual yang dipaparkan dan untuk memperkuat argumentasi, pertanyaan studi ini mencakup:

1. Bagaimana bentuk representasi ruang pengelolaan sampah rumah tangga di pemukiman kumuh pinggir sungai ciliwung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menentukan tujuan yang ingin dicapai, meliputi:

1. Melakukan analisis mengenai bentuk representasi ruang pengelolaan sampah rumah tangga di pemukiman kumuh pinggir sungai ciliwung

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat di dalam studi dalam segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berkontribusi pada pengembangan jangka panjang di dalam teori pembelajaran, sementara manfaat praktis mempunyai dampak langsung pada berbagai aspek dalam proses pembelajaran. Adapun dijelaskan manfaat teoritis dan praktis di bawah ini.

1.4.1 Akademik

a) Bagi Peneliti

1. Diharapkan studi ini bisa dijadikan sebagai bahan studi atau referensi tambahan dalam melaksanakan studi terkait topik serupa oleh peneliti berikutnya.
2. Dijadikan sebagai literature tambahan pada studi terdahulu.

b) Bagi Mahasiswa

1. Melatih peserta didik agar bisa menjelaskan dan membahas isu dengan cara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
2. Dijadikan sebagai pembelajaran tambahan pada mahasiswa perihal materi yang berkaitan.

1.4.2 Non Akademik

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan temuan studi ini bisa digunakan sebagai masukan yang memberi manfaat dalam upaya pengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah dalam lingkungan pemukiman kumuh.
- b. Studi ini bisa dimanfaatkan sebagai pengetahuan tambahan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Sistematika penulisan dilakukan secara pendekatan deduktif yang berarti penulisan dari konteks umum ke konteks yang lebih khusus. Untuk memastikan kelancaran penyajian penelitian, disusun sistematika penulisan yang menyelaraskan setiap bagian secara teratur, memastikan hubungan yang konsisten antara satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur penulisan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bab dengan penyertaan daftar pustaka yang meliputi berbagai subbab. Berikut adalah penjelasan tentang struktur penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan latar belakang permasalahan terkait objek penelitian, merumuskan topik permasalahan, memaparkan tujuan penelitian dan memberi penjelasan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu, serta penjelasan teori dari seorang ahli mengenai strategi, dan pengelolaan sampah. Penulis juga membuat penulisan terkait kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menjelaskan metodologi penelitian meliputi pendekatan penelitian, penetapan informan, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, teknik dalam mengelola dan menganalisis data, serta lokasi dan juga jadwal dilaksanakannya penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menjabarkan hasil penelitian dan membuat pembahasan mengenai Representasi Ruang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Kelompok Rumah Tangga Pemukiman Kumuh di Pinggiran Sungai Ciliwung)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis memberikan kesimpulan serta saran terkait permasalahan penelitian.